

## ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF PARKING LEVY REVENUE IN BANDUNG

Iftitah Ardella Husna Hanifah<sup>1</sup>, Ivan Yudianto<sup>2</sup>

Universitas Padjadjaran  
iftitahardelia22@gmail.com

### ABSTRACT

This research aims to determine how the effectiveness of parking levy revenue in Bandung and evaluating the implementation of the collection. Type of this research is applied research with descriptive and time series analysis. The approach that used in this research is a combined approach. The techniques of data collecting were by interviewing, observing, and documenting to Bandung City Parking Management Unit, the Bandung Financial and Asset Management Agency, the parking attendant, and the people who parked in Bandung. The data analysis technique consisted of an analysis of the development of the effectiveness of parking levy with trend analysis and “t” statistic test from 2009 to 2018, and analysis of the 7S McKinsey effectiveness theory for evaluating the implementation of the collection. The results of data analysis show that the development of the effectiveness of parking levy is significant with a downward trend and the implementation of the collection of aspects from strategy, structure, systems, skills, and staff dimension is considered ineffective.

**Keywords:** Effectiveness, Local Revenue, Parking Levy

## ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA BANDUNG

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kota Bandung serta evaluasi pelaksanaan pemungutannya. Jenis penelitian ini adalah applied research dengan analisis deskriptif dan time series. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan gabungan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi pada UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung, juru parkir, dan masyarakat yang parkir di Kota Bandung. Teknik analisis data terdiri dari analisis perkembangan efektivitas retribusi parkir dengan analisis trend dan uji t dari tahun 2009 sampai tahun 2018, serta analisis teori efektivitas 7S McKinsey untuk evaluasi pelaksanaan pemungutannya. Hasil analisis data menunjukkan bahwa perkembangan efektivitas retribusi parkir signifikan dengan trend menurun dan pelaksanaan pemungutannya baik dari aspek pada dimensi strategi, struktur, sistem, skill, maupun staf dinilai belum efektif..*

**Kata-kata Kunci:** Efektivitas, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Parkir

## PENDAHULUAN

Retribusi daerah merupakan salah satu faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya dalam menunjang pemerintahan daerah (Yani, 2002). Retribusi daerah, menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Salah satu jenis retribusi daerah sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 adalah retribusi parkir yang terdiri dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang termasuk pada retribusi jasa umum dan retribusi tempat khusus parkir yang termasuk pada retribusi jasa usaha.

Kota Bandung merupakan salah satu dari 20 kota besar di Indonesia. Berdasarkan artikel berita dari Detik.com pada tahun 2019, menurut hasil survei dari Asian Development Bank (ADB), Kota Bandung dinobatkan sebagai kota termacet ke-14 se-Asia, berada di atas ibukota negara Jakarta yang berada di urutan 17 (Triani, 2019). Hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Bandung setiap tahunnya.

**Tabel 1. Proyeksi Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jumlah Penduduk Kota Bandung Tahun 2009 - 2018**

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Jumlah Penduduk
2009	1.452.504	2.417.288
2010	1.196.813	2.394.873
2011	1.252.230	2.424.957
2012	1.355.815	2.455.517
2013	1.443.217	2.483.977
2014	1.539.409	2.470.802
2015	1.617.022	2.481.469
2016	1.716.698	2.490.622
2017	1.811.498	2.497.938
2018	1.738.672	2.503.710

Sumber : Kota Bandung Dalam Angka (Badan Pusat Statistik Kota Bandung, 2019), diolah

Tabel 1 diatas menunjukkan proyeksi jumlah kendaraan bermotor dan penduduk di Kota Bandung tahun 2009 – 2018. Jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung untuk tahun 2011 – 2017 selalu mengalami peningkatan, sedangkan untuk tahun 2010 dan 2018 sedikit mengalami penurunan namun tidak signifikan. Di sisi lain, jumlah penduduk di Kota Bandung dari tahun 2010 – 2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali tahun 2010 dan 2014 mengalami penurunan dengan jumlah yang kecil. Tingginya jumlah penduduk tersebut menyebabkan tingkat kepadatan penduduk Kota Bandung, yang menurut artikel berita Kompasiana.com, berada di peringkat ke-4 di Indonesia pada tahun 2015 (Apriadi, 2019). Fadillah (2013) menyebutkan bahwa semakin

bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan atas kendaraan bermotor mempunyai implikasi tertentu terhadap sektor parkir. Parkir menjadi kebutuhan bagi pemilik kendaraan yang menginginkan kendaraannya parkir di tempat yang mudah ketika sedang berada dalam perjalanan. Semakin meningkatnya jumlah kepemilikan terhadap kendaraan bermotor semakin banyak pula kebutuhan terhadap parkir. Oleh karena itu, apabila dilihat dari jumlah penduduk dan kendaraan bermotor di Kota Bandung, potensi retribusi parkir di Kota Bandung sangatlah besar dikarenakan kebutuhan akan parkir yang tinggi. Adapun menurut artikel berita Jabarnews.com, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Didi Ruswandi, menyatakan bahwa potensi retribusi parkir di Kota Bandung sebesar delapan puluh miliar rupiah (Suherlan, 2018). Namun, pada kenyataannya realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Bandung jauh dari target yang diharapkan. Berikut ini data penerimaan retribusi parkir di Kota Bandung tahun 2009 – 2018.

**Tabel 2. Pencapaian Penerimaan Retribusi Parkir Kota Bandung Tahun 2009 - 2018**

Tahun	Target Retribusi Parkir (Rp)	Realisasi Retribusi Parkir (Rp)	Pencapaian Penerimaan Retribusi Parkir (%)
2009	4.500.000.000	4.503.206.000	100,07
2010	4.800.000.000	4.553.160.000	94,85
2011	5.800.000.000	4.827.487.000	83,23
2012	6.800.000.000	4.903.047.000	72,10
2013	6.855.000.000	5.276.310.000	76,97
2014	6.855.000.000	5.528.380.000	80,64
2015	9.120.000.000	5.071.064.500	55,60
2016	89.165.000.000	4.929.593.500	5,52

2017	140.264.093.845	5.995.581.500	4,27
2018	118.642.862.660	10.452.630.000	8,81

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung, 2019) dan Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung (UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung, 2019), diolah

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2009 – 2018, target retribusi parkir di Kota Bandung yang mampu terpenuhi hanya pada tahun 2009. Bahkan, untuk tahun 2016 – 2018 pencapaian penerimaan retribusi parkir sangatlah jauh dari target. Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan besarnya potensi retribusi parkir di Kota Bandung. Penerimaan retribusi parkir yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir di Kota Bandung tidak efektif. Adapun tidak efektifnya penerimaan retribusi parkir tersebut menggambarkan bahwa efektivitas pemungutan retribusi parkir rendah. Hal tersebut sesuai dengan Murmaningtyas (2007) di dalam penelitiannya pada retribusi pasar yang menyatakan bahwa semakin besar penerimaan retribusi pasar yang dihasilkan terhadap target yang sudah ditentukan, maka semakin efektif proses kerja Kantor Pengelolaan Pasar Daerah.

Melihat permasalahan di atas yang menjelaskan fenomena terkait efektivitas

penerimaan retribusi parkir di Kota Bandung, maka peneliti mengambil judul “Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Bandung”

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian terapan (*applied research*). Menurut Neuman (2003), dilihat dari sudut pandang kegunaan, penelitian terapan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis atau menghasilkan produk baru. Jenis penelitian terapan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian evaluasi, yang menurut Mulyatiningsih (2011), merupakan penelitian terapan yang digunakan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan, program, dan proyek. Pemungutan retribusi parkir di Kota Bandung merupakan salah satu kebijakan pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu, untuk melakukan evaluasi efektivitas pemungutan retribusi parkir di Kota Bandung, dalam penelitian ini digunakan penelitian evaluasi kebijakan. Penelitian evaluasi kebijakan memiliki tujuan untuk memberikan rekomendasi sebagai dasar perumusan kebijakan, menunjang implementasi kebijakan, atau melihat bagaimana kinerja dan dampak pelaksanaan kebijakan. (Mulyatiningsih, 2011)

Adapun dalam rangka menjawab pertanyaan serta memperkaya data dan informasi mengenai topik yang diangkat untuk pencapaian tujuan dari penelitian ini, penelitian deskriptif digunakan oleh peneliti. Neuman (2003)

menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dikelompokkan berdasarkan tujuan penelitian. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2011) adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Variabel dalam penelitian ini yaitu efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kota Bandung. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antar fenomena yang diteliti (Nazir, 2011).

Di samping jenis penelitian terapan dan penelitian deskriptif, penelitian ini juga termasuk ke dalam penelitian *longitudinal* dengan cara *time series*. Neuman (2003) mengklasifikasikan penelitian *longitudinal* ke dalam penelitian berdasarkan waktu pengumpulan data.

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian gabungan untuk melakukan penelitian ini. Apabila kedua tipe penelitian (kuantitatif dan kualitatif) digabungkan, maka penelitian kuantitatif akan memberikan kerangka tentang sesuatu, sedangkan isi dari kerangka itu yang terkait dengan konteksnya akan disumbangkan oleh penelitian kualitatif. (Yusuf, 2014)

## Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan strategi eksplanatoris sekuensial dalam pengumpulan data. Yusuf (2014) menyatakan bahwa peneliti

gabungan setelah melakukan analisis data kuantitatif menemukan hasil yang mengejutkan, maka hasil tersebut ditelusuri lebih lanjut dengan penelitian kualitatif. Peneliti melakukan pengumpulan data kuantitatif dengan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data seperti Laporan Realisasi Anggaran Kota Bandung tahun 2009 – 2018 dan Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung tahun 2009 – 2018.

Adapun penelitian kualitatif menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumen. Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada informan yang merupakan pihak-pihak yang terkait dengan pemungutan retribusi parkir di Kota Bandung, yaitu kepada UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung, juru parkir, dan masyarakat yang melakukan parkir di Kota Bandung. Metode observasi dilakukan peneliti untuk mengamati perilaku para juru parkir dan masyarakat yang melakukan parkir di Kota Bandung. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di beberapa tempat parkir di Kota Bandung. Selain itu, peneliti juga mengamati perilaku pegawai UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung ketika sedang bekerja. Metode dokumentasi dilakukan peneliti dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan retribusi parkir seperti berikut: (1) Struktur organisasi dan tupoksi UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung,

(2) Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandung, (3) Peraturan daerah dan peraturan walikota terkait retribusi parkir di Kota Bandung, (4) SOP pemungutan retribusi parkir di Kota Bandung, dan (5) Kota Bandung Dalam Angka 2010 – 2019.

### Teknik Analisis Data

Pertama, analisis data kuantitatif. Menurut Sabana & Sutrisno (2013), perhitungan efektivitas anggaran retribusi parkir dilakukan dengan mengukur besarnya rasio realisasi penerimaan retribusi parkir dengan anggaran retribusi parkir yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, rasio efektivitas retribusi parkir, menurut Religia & Pratomo (2014) dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Retribusi Parkir} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan, standarisasi tingkat efektivitas ditetapkan sebagai berikut:

1. Koefisien efektivitas bernilai diatas 100% berarti sangat efektif
2. Koefisien efektivitas bernilai antara 90% - 100% berarti efektif
3. Koefisien efektivitas bernilai antara 80% - 90% berarti cukup efektif

4. Koefisien efektivitas bernilai antara 60% - 80% berarti kurang efektif
5. Koefisien efektivitas bernilai di bawah 60% berarti tidak efektif

- x = Unit tahun yang dihitung berdasarkan tahun dasar yang akan ditentukan x = 0 (interval waktu)
- y = Efektivitas retribusi parkir

Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Teguh (2010), dengan penelitiannya tentang kontribusi retribusi parkir, peneliti melakukan penyesuaian untuk penelitian ini dengan melakukan analisis dengan menggunakan analisis *time series (trend)* dengan metode kuadrat terkecil (*least square*), di mana *trend*, seperti yang dijelaskan oleh Saleh (2004), adalah suatu metode analisis yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi maupun peramalan pada masa mendatang. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis perkembangan efektivitas retribusi parkir Kota Bandung untuk tahun 2009 sampai 2018.

Rumus yang digunakan yaitu :

$$Y' = a + bX$$

Dimana:

$$a = \frac{\sum y}{n}$$

$$b = \frac{\sum xy}{\sum x^2}$$

Dengan syarat x = 0

Keterangan:

- Y' = Variabel yang diramalkan (efektivitas retribusi parkir)
- a = Konstanta yang menunjukkan besarnya y apabila x = 0
- b = Taksiran rata-rata kenaikan efektivitas retribusi parkir setiap tahun
- n = Jumlah tahun

Apabila telah diperoleh persamaan  $Y' = a + bX$ , kemudian dilakukan uji hipotesis untuk mengetahui nilai b signifikan atau tidak. Pengujian dilakukan dengan uji statistik t dengan urutan sebagai berikut:

a. Merumuskan Hipotesis

Hipotesis dalam pengujian ini dirumuskan sebagai berikut:

Ho = tidak ada perkembangan efektivitas retribusi parkir yang signifikan di Kota Bandung pada tahun 2009 sampai 2018

Ha = ada perkembangan efektivitas retribusi parkir yang signifikan di Kota Bandung pada tahun 2009 sampai 2018

b. Menentukan Taraf Nyata (*Significant Level*)

*Significant Level* yang ditentukan sebesar 5%

c. Menghitung t hitung

Dalam menghitung t hitung, menurut Sudjana (2005), digunakan rumus sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{b}{Sb}$$

Keterangan:

- b = Perubahan variabel (y) per tahun secara berkala
- Sb = *Standar Error Coeficient*

Rumus *Standar Error Coefficient* adalah:

$$Se^2 = \frac{\sum (y - \hat{y})^2}{n - 2}$$

Dimana  $Se^2$  diperoleh dengan rumus:

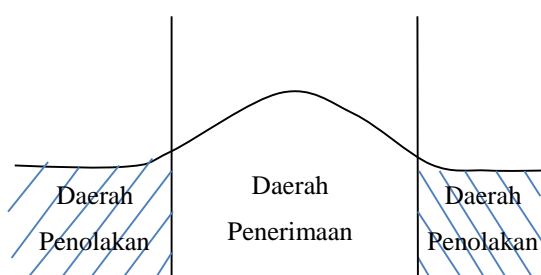
$$Se^2 = \frac{\sum (y - \hat{y})^2}{n - 2}$$

#### d. Menentukan Kriteria Pengujian

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

$H_0$  diterima jika nilai t hitung terletak di daerah penerimaan  $H_0$ .

$H_0$  ditolak jika nilai t hitung terletak di daerah penolakan  $H_0$ .



**Gambar 1. Gambar Penerimaan dan Penolakan  $H_0$**

Sumber: Teguh (2010)

#### e. Mengambil Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengujian ini, yaitu:

$H_0$  diterima artinya tidak ada perkembangan efektivitas retribusi parkir yang signifikan di Kota Bandung pada tahun 2009 – 2018.

$H_0$  ditolak artinya ada perkembangan efektivitas retribusi parkir yang signifikan di Kota Bandung pada tahun 2009 – 2018.

Kedua, analisis data kualitatif. Data hasil wawancara akan dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis*. Analisis ini berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi secara kualitatif, membaca simbol-simbol, memaknakan isi interaksi simbolis yang terjadi dalam komunikasi (Bungin, 2009). Langkah –langkah yang dapat dilakukan oleh peneliti pada analisis ini menurut Bungin (2009), yaitu:

1. Mengorganisasikan Data
2. Pengelompokkan berdasarkan Kategori, Tema, dan Pola Jawaban

Berdasarkan kerangka teori dan pedoman wawancara, peneliti menyusun sebuah kerangka awal analisis sebagai acuan dan pedoman dalam melakukan *coding* yaitu melakukan pemilihan data dan mengelompokkannya dalam suatu aspek yang ditetapkan berdasarkan lima dimensi dari teori efektivitas 7-S dari McKinsey. Lima dimensi tersebut mengacu pada penelitian Nuansa (2012), yaitu strategi, struktur, sistem, *skill*, dan staf.

**Tabel 3. Operasionalisasi Konsep Penelitian Kualitatif**

Variabel	Dimensi	Aspek
Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir	Strategi	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Visi dan misi</li> <li>. Tujuan</li> <li>. Perencanaan</li> <li>. Pengambilan keputusan</li> </ul>
	Struktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Pembagian kerja</li> <li>. Adanya formalisasi pekerjaan</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>. Koordinasi</li> <li>. Sentralisasi dan desentralisasi</li> <li>. Komunikasi</li> </ul>
	Sistem	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Pendataan</li> <li>. Penetapan</li> <li>. Pemungutan dan penyetoran</li> <li>. Pengawasan</li> <li>. Penagihan</li> </ul>
	Skill	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Keterampilan</li> <li>. Kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan</li> </ul>
	Staf	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Rekrutmen</li> <li>. Kesesuaian posisi dan orang</li> <li>. Motivasi</li> <li>. Pelatihan</li> </ul>

Sumber: Anom (2008), Robbins & Judge (2008), Nuansa (2012), Sopbaba et al. (2012), dan Alshaher (2013), diolah

3. Menguji Asumsi atau Permasalahan yang Ada terhadap Data
4. Mencari Alternatif Penjelasan bagi Data
5. Menulis Hasil Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini hasil perhitungan efektivitas retribusi parkir di Kota Bandung tahun 2009 sampai tahun 2018.

**Tabel 4. Efektivitas Retribusi Parkir Kota Bandung Tahun 2009 – 2018**

Tahun	Target Penerimaan Retribusi Parkir	Realisasi Penerimaan Retribusi	Efektivitas (%)	Ket.
-------	--	--------------------------------------	--------------------	------

	(Rp dalam ribuan)	Parkir (Rp dalam ribuan)		
2009	4.500.000	4.503.206	100,07124	Sangat Efektif
2010	4.800.000	4.553.160	94,85750	Efektif
2011	5.800.000	4.827.487	83,23253	Cukup Efektif
2012	6.800.000	4.903.047	72,10363	Kurang Efektif
2013	6.855.000	5.276.310	76,97024	Kurang Efektif
2014	6.855.000	5.528.338	80,64680	Efektif
2015	9.120.000	5.071.064,5	55,60378	Tidak Efektif
2016	89.165.000	4.929.593,5	5,52862	Tidak Efektif
2017	140.264.093,8	5.995.581,5	4,27449	Tidak Efektif
2018	118.642.862,6	10.452.630	8,81016	Tidak Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung, 2019) dan Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung (UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung, 2019), diolah

Selanjutnya, untuk mengetahui apakah perkembangan efektivitas retribusi parkir terjadi secara signifikan atau tidak, perlu dilakukan analisis perkembangan efektivitas retribusi parkir. Perhitungan perkembangan efektivitas retribusi parkir dilakukan dengan menggunakan persamaan *trend* dengan metode kuadrat terkecil (*least square*), kemudian untuk menguji signifikansi perkembangan tersebut dilakukan dengan uji t.



Setelah dilakukan perhitungan persamaan *trend* efektivitas retribusi parkir di Kota Bandung dari tahun 2009 sampai 2018 dengan metode kuadrat terkecil (*least square*), sesuai dengan langkah-langkah yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, diperoleh persamaan *trend*  $Y' = 58,15633 - 5,74120 (X)$  dengan nilai  $Y'$  sebagai berikut:

**Tabel 5. Perhitungan Nilai *Trend* Efektivitas Retribusi Parkir ( $Y'$ ) Kota Bandung Tahun 2009 – 2018**

Tahun	X	$Y'$
2009	-9	109,82713
2010	-7	98,34473
2011	-5	86,86233
2012	-3	75,37993
2013	-1	63,89753
2014	1	52,41513
2015	3	40,93273
2016	5	29,45033
2017	7	17,96793
2018	9	6,48553

Sumber: Olah Data Penulis

Berikutnya untuk mengetahui apakah perkembangan efektivitas retribusi parkir signifikan atau tidak, maka perlu dilakukan uji  $t$  dengan langkah-langkah seperti pada bagian sebelumnya. Hasil yang didapatkan adalah bahwa nilai  $t$  hitung lebih kecil dari negatif  $t$  tabel yaitu  $-6,47216 < -2,26216$  sehingga  $H_0$ , tidak ada perkembangan efektivitas retribusi parkir yang signifikan di Kota Bandung pada tahun 2009

sampai 2018, ditolak.  $H_0$  yang ditolak menunjukkan bahwa ada perkembangan efektivitas retribusi parkir yang signifikan di Kota Bandung pada tahun 2009 – 2018.

Dari pengujian hipotesis diatas diperoleh hasil bahwa terdapat perkembangan efektivitas retribusi parkir yang signifikan di Kota Bandung dari tahun 2009 sampai tahun 2018 sehingga hasil tersebut sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Adapun sesuai dengan hasil perhitungan pada tabel 5, perkembangan efektivitas retribusi parkir ( $Y'$ ) setiap tahunnya mengalami penurunan. Perkembangan efektivitas retribusi parkir yang signifikan tersebut dikarenakan pada tahun 2016 terjadi peningkatan target retribusi parkir yang sangat tinggi dari Rp9.120.000.000 menjadi Rp89.165.000.000, kemudian meningkat lagi di tahun 2017 menjadi Rp140.264.093.845, dan besarnya peningkatan target retribusi parkir tersebut tidak diikuti oleh peningkatan realisasi penerimaan retribusi parkir yang sepadan. Maka dari itu, hal tersebut menyebabkan persentase efektivitas retribusi parkir pada tahun 2016 mengalami penurunan yang sangat besar yaitu dari 55,60% menjadi 5,52% dan di tahun 2017 turun lagi menjadi 4,27%. Adapun penurunan persentase efektivitas tersebut sesuai dengan standarisasi tingkat efektivitas termasuk ke dalam kategori tidak efektif. Oleh karena itu, perkembangan efektivitas retribusi parkir yang signifikan dengan kurva yang menurun menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir di Kota

Bandung dari tahun ke tahun pemungutannya masih belum efektif.

Efektivitas penerimaan retribusi parkir menunjukkan bagaimana efektivitas pemungutan retribusi parkir itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan realita yang terjadi di Kota Bandung di mana efektivitas penerimaan retribusi parkir perkembangannya signifikan menurun dan pemungutan retribusi parkir yang dinilai belum efektif. Oleh karena itu, untuk optimalisasi efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung melalui UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung, perlu untuk melakukan perbaikan pada efektivitas pemungutan retribusi parkir itu sendiri.

Pada penelitian ini, berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan yang merupakan pihak-pihak yang terkait dengan pemungutan retribusi parkir di Kota Bandung, yaitu kepada UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung, juru parkir, dan masyarakat yang melakukan parkir di Kota Bandung, hasil observasi, serta hasil dokumentasi ditemukan permasalahan pada beberapa aspek dari setiap dimensi sesuai teori efektivitas 7-S dari McKinsey yang dijadikan pedoman untuk melakukan analisis data kualitatif. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, peneliti memberikan rekomendasi kepada UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung untuk melakukan perbaikan efektivitas pemungutan

retribusi parkir melalui pembenahan aspek-aspek dari dimensi teori efektivitas 7-S dari McKinsey yang belum sesuai dengan teori dan ketentuan yang berlaku, yang dijelaskan sebagai berikut: Dimensi 1. Strategi: Aspek a. Visi dan Misi: Permasalahan yang terjadi yaitu UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung tidak memiliki visi dan misi yang spesifik menggambarkan UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung sebagai pemungut retribusi parkir. Adapun rekomendasi dari peneliti adalah selain visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Bandung, UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung perlu memiliki visi dan misi internal UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung yang mencakup tujuan dan fungsi UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung sebagai pemungut retribusi parkir. Oleh karena itu, dengan adanya visi dan misi yang lebih spesifik tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada pegawai mengenai tujuan UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung. Sebagai contoh seperti yang telah diterapkan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Kota Surakarta, berdasarkan Nugroho (2011), dengan visi dan misi sebagai berikut: Visi: Mewujudkan Kota Surakarta yang rapi dan aman dalam penataan parkir dan sekaligus menjadikan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran sebagai salah satu primadona dalam mendukung keberhasilan pendapatan asli daerah. Misi:

1. Menata dan memelihara lahan parkir agar tetap bersih, rapi, dan aman.

2. Meminta kepada pihak terkait agar dalam mendirikan bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya manusia dalam menyediakan lahan parkir.
3. Menjadikan para penata lahan parkir bertiket dan dapat dipercaya masyarakat sadar parkir dan biayanya.
4. Melaksanakan pemungutan retribusi secara teratur untuk meningkatkan pendapatan daerah.
5. Menjadikan misi tersebut sebagai penunjang dalam kinerja melaksanakan tugas dan fungsinya.

Aspek b. Perencanaan: Permasalahan yang ditemukan adalah Target penerimaan retribusi parkir di Kota Bandung ditetapkan terlalu tinggi dengan tidak mempertimbangkan realisasi penerimaan retribusi parkir tahun-tahun sebelumnya, terutama dimulai tahun 2016, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Selain itu, target penerimaan retribusi parkir yang ditetapkan juga sangat jauh perbedaannya dengan realita besarnya anggaran yang dihabiskan oleh UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung. Adapun rekomendasi dari peneliti adalah pemerintah Kota Bandung perlu lebih bijak dalam menetapkan target penerimaan retribusi parkir. Penetapan target retribusi parkir harus sesuai dengan ketentuan pada peraturan menteri dalam negeri yang mengatur pedoman penyusunan anggaran

pendapatan dan belanja daerah salah satunya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Adanya penyesuaian target penerimaan retribusi parkir tersebut juga didukung dari adanya ketidakseimbangan antara realisasi anggaran yang dibutuhkan oleh UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung dalam pemungutan retribusi parkir dengan besarnya penerimaan retribusi parkir yang harus dicapai. Dengan dilakukannya penyesuaian target penerimaan retribusi parkir tersebut maka rasio efektivitas penerimaan retribusi parkir akan menjadi lebih efektif.

Dimensi 2. Struktur: Aspek a. Pembagian Kerja dan Koordinasi: Permasalahan yang terjadi adalah pembagian kerja untuk pemungutan retribusi parkir di UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung menimbulkan adanya beban kerja yang terlalu berat pada beberapa bagian karena jam kerja yang terlalu banyak. Adapun koordinasi internal di UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung tidak efektif karena tidak adanya perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas yaitu terjadinya kerja sama antar bagian dalam penyelesaian tugas pemungutan retribusi parkir. Kedua permasalahan tersebut disebabkan oleh sumber daya manusia di UPT Pengelolaan Perparkiran yang tidak mencukupi kebutuhan. Oleh sebab itu, peneliti memberikan rekomendasi yaitu UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung perlu melakukan penambahan pegawai baik dengan

membuat pengajuan ke Dinas Perhubungan Kota Bandung maupun dengan rekrutmen secara mandiri. Oleh karena itu, dengan bertambahnya pegawai di UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung, jumlah jam kerja bagi pegawai dapat menurun dan beban kerja menjadi lebih efektif. Di samping itu, koordinasi dapat terlaksana dengan lebih efektif selaras dengan penambahan pegawai karena penyelesaian tugas bukan oleh bagiannya dapat dihindari. Adapun rekomendasi pada aspek pembagian kerja dan koordinasi tersebut telah dilaksanakan oleh UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung sejalan dengan berubahnya bentuk kelembagaan menjadi badan layanan umum daerah (BLUD).

Aspek b. Formalisasi Pekerjaan: Permasalahan yang ditemukan adalah UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung tidak memiliki deskripsi tugas yang jelas bagi setiap bagian pada struktur organisasi. Bagian pada struktur organisasi yang memiliki deskripsi tugas yang jelas hanya Kepala UPT Parkir dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Oleh karena itu, rekomendasi dari peneliti adalah setiap bagian pada struktur organisasi UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung perlu memiliki deskripsi tugas yang jelas sehingga setiap bagian memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugas pemungutan retribusi parkir di Kota Bandung.

Aspek c. Sentralisasi dan Desentralisasi: Terdapat permasalahan pada aspek ini yaitu sistem sentralisasi yang diterapkan di UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung

memberikan kendala pada keputusan anggaran sehingga pemenuhan kebutuhan-kebutuhan untuk pemungutan retribusi parkir tidak efektif. Kebutuhan yang tidak terpenuhi tersebut adalah barang yang dibutuhkan segera di waktu yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran. Adapun peneliti memberikan rekomendasi kepada UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung bahwa perlu menerapkan sistem desentralisasi dalam keputusan anggaran dengan perubahan kelembagaan menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Menurut Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum, BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian Negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum, di dalam menjalankan kewenangannya, BLU menyusun rencana bisnis dan anggaran (RBA) tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis. RBA disusun oleh BLU dengan berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN/APBD. Lalu selanjutnya, BLU mengajukan RBA kepada menteri atau pimpinan

lembaga atau SKPD untuk memperoleh persetujuan. Dengan adanya perencanaan anggaran oleh BLU maka keputusan anggaran akan menjadi lebih mandiri dan fleksibel sehingga kebutuhan-kebutuhan pemungutan dari pelayanan parkir dapat terpenuhi dengan baik. Rekomendasi pada aspek sentralisasi dan desentralisasi tersebut telah dilaksanakan oleh UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung dimulai dari tahun 2020.

Aspek d. Komunikasi: Di dalam pelaksanaan wawancara, peneliti menemukan bahwa UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung masih belum bisa memenuhi komitmen dengan baik dalam berkomunikasi dengan juru parkir mengenai permasalahan gaji yang belum dibayarkan dan penempatan juru parkir di tempat parkir yang dijanjikan sebelumnya. Oleh karena itu rekomendasi peneliti untuk UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung adalah perlunya meningkatkan cara berkomunikasi terutama terkait permasalahan yang memiliki ketetapan atau perjanjian sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan. Perbaikan komunikasi dapat dilakukan dengan mem-*follow up* komitmen yang telah diberikan sebelumnya kepada pihak yang terkait.

Dimensi 3. Sistem: Aspek a. Pendataan: Peneliti menemukan ketidaksesuaian antara daftar lokasi parkir pada Keputusan Walikota Bandung Nomor 551/Kep.648-DisHub/2017 tentang penetapan lokasi dan posisi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir di Kota Bandung dengan

realita di lapangan saat melakukan wawancara. Adapun rekomendasi dari peneliti yaitu UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung perlu melakukan pendataan dan kajian ulang mengenai lokasi-lokasi parkir yang dilaksanakan pemungutan retribusi parkir. Setelah itu, UPT Pengelolaan Perparkiran perlu untuk mengajukan perubahan keputusan walikota mengenai lokasi parkir agar pedoman dalam pemungutan retribusi parkir menjadi lebih sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

Aspek b. Pemungutan dan Penyetoran: Pada pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi parkir ditemukan ketidaksesuaian antara yang diatur pada standar operasional prosedur (SOP) dan peraturan dengan realita di lapangan. Ketidaksesuaian tersebut yaitu sebagai berikut: (1) Ketentuan mengenai pemungutan retribusi parkir dengan mesin parkir ketika mesin parkir mengalami kerusakan tidak terdapat di dalam SOP pemungutan retribusi parkir dengan mesin parkir, (2) Juru parkir tidak memberikan karcis parkir kepada wajib retribusi dalam pemungutan retribusi parkir secara manual, (3) Pemungutan retribusi parkir dengan mesin parkir tidak dilakukan dengan mesin secara langsung saat wajib retribusi melakukan pembayaran, (4) Besaran tarif retribusi parkir yang berbeda dengan ketentuan pada Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 4 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 16 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perhubungan dan retribusi di bidang perhubungan. (5) Penetapan target setoran

retribusi parkir untuk juru parkir ditetapkan secara lisan, dan (6) Perubahan penyeteroran target setoran juru parkir yang dibesokan dan diduakalikan. Adapun rekomendasi yang peneliti berikan yaitu UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung perlu mengkaji ulang SOP pemungutan retribusi parkir dengan mesin parkir terkait kondisi mesin parkir yang mengalami kerusakan. Kemudian, UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung perlu melakukan pembinaan kepada juru parkir mengenai SOP dan peraturan yang berlaku dalam pemungutan retribusi parkir. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga perlu digencarkan tidak hanya mengenai mesin parkir tetapi juga mengenai SOP pemungutan retribusi parkir secara keseluruhan dan tarif retribusi parkir yang sesuai peraturan daerah. Hal itu dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui informasi tersebut. Oleh karena itu, apabila masyarakat mengetahui informasi tersebut terutama mengenai karcis parkir, mesin parkir, dan tarif parkir diharapkan dapat menjadi sistem evaluasi bagi juru parkir untuk melakukan pemungutan sesuai dengan ketentuan. Sosialisasi perlu dilakukan melalui media-media yang belum pernah sebelumnya seperti media radio, televisi, ataupun baliho dan *banner* seperti sosialisasi pemungutan pajak oleh Kantor Pajak Pratama agar lebih menjangkau masyarakat yang lebih luas. Selain itu, UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung juga bisa mengadakan program sosialisasi dengan membuka *stand* di tempat umum yang sering dikunjungi masyarakat seperti Alun-Alun Kota Bandung, Gasibu,

maupun taman-taman yang ada di Kota Bandung, serta di ruas-ruas jalan yang terdapat tempat parkir dengan mesin parkir. Kemudian, target setoran retribusi parkir untuk juru parkir perlu dilakukan perubahan menjadi dengan tulisan dan materai agar resiko saat wanprestasi dapat diminimalisir. Terakhir, kepala sektor juga perlu dilakukan pembinaan terkait dengan ketentuan penyeteroran target setoran juru parkir apabila terjadi hal-hal yang tidak semestinya seperti apabila setoran tidak memenuhi target.

Aspek c. Pengawasan: Permasalahan yang ditemukan adalah pengawasan terhadap juru parkir dalam pemungutan retribusi parkir oleh UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung masih belum efektif karena hanya sebatas *mobilling* pada waktu tertentu saja. Hal tersebut dikarenakan adanya kendala terbatasnya sumber daya manusia yang ada. Oleh karena itu rekomendasi peneliti untuk UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung perlu adalah membenahi sistem pengawasan terhadap juru parkir dalam melakukan pemungutan retribusi parkir. Pengawasan yang perlu dilakukan adalah pengawasan yang menetap pada setiap titik parkir atau setiap beberapa titik parkir sehingga pengawasan dapat lebih mendalam. Oleh karena itu, UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung perlu melakukan rekrutmen untuk memenuhi kekurangan sumber daya manusia yang ada. Adapun rekrutmen tersebut telah mulai dilakukan oleh UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung sejalan dengan perubahan bentuk kelembagaan menjadi BULD. Selain itu,

pengawasan yang dilakukan juga perlu mencakup pengecekan kinerja dan pembinaan juru parkir terkait pelaksanaan SOP dan peraturan dalam pemungutan retribusi parkir.

Dimensi 4. *Skill*: Aspek a. Kemampuan untuk Menyelesaikan Pekerjaan: Peneliti menemukan permasalahan yaitu juru parkir di Kota Bandung belum dapat menyelesaikan tugasnya dalam mengarahkan masyarakat yang melakukan parkir untuk menggunakan mesin parkir pada pemungutan retribusi parkir dengan mesin parkir. Oleh sebab itu, rekomendasinya adalah UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung perlu untuk terus membina juru parkir untuk tidak henti-hentinya mengarahkan masyarakat yang parkir di tempat parkir dengan mesin parkir untuk menggunakan mesin parkir. Pembinaan dapat dilakukan saat pengawasan dilaksanakan maupun saat juru parkir melakukan penyetoran target setoran. Selain itu, untuk upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan mesin parkir, UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung perlu untuk terus mengencangkan sosialisasi terkait pentingnya penggunaan mesin parkir, langkah-langkah penggunaan mesin parkir, maupun penawaran pembelian *e-money* untuk mendukung pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dengan mesin parkir.

Dimensi 5. Staf: Aspek a. Rekrutmen dan Kesesuaian Posisi dan Orang: Permasalahan yang ditemukan yaitu untuk kesesuaian posisi dan orang pada UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung tidak efektif karena masih terdapat

ketidaksesuaian seperti orang yang berkompeten di bagian teknis tetapi melakukan pekerjaan di bagian lainnya. Oleh karena itu, rekomendasi untuk UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung adalah perlunya melakukan rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang masih sangat kurang sehingga ketidaksesuaian posisi dengan orang tersebut dapat diatasi. Adapun rekomendasi pada aspek rekrutmen dan kesesuaian posisi dan orang tersebut telah mulai dilaksanakan oleh UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung sejalan dengan perubahan bentuk kelembagaan menjadi BULD.

Aspek b. Motivasi: Pada pemungutan retribusi parkir di Kota Bandung, UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung belum memberikan motivasi baik kepada pegawai maupun juru parkir dengan baik. Motivasi yang telah dilakukan hanya pada saat melakukan apel pagi untuk para pegawai. Adapun peneliti merekomendasikan UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung untuk perlu meningkatkan pemberian motivasi baik kepada pegawai maupun juru parkir. Motivasi yang diberikan kepada pegawai dapat berupa insentif apabila target penerimaan retribusi parkir dapat terpenuhi atau apabila penerimaan retribusi parkir dapat mengalami peningkatan sebesar sekian persen. Selain itu, bagian kepegawaian di UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung dapat melakukan pengamatan kepada setiap bagian yang ada di struktur organisasi dan kemudian dapat mengumumkan bagian yang

memiliki kinerja terbaik setiap bulannya. Adapun motivasi kepada juru parkir dapat dilakukan dengan pemberian sembako dan THR di saat Hari Raya Idul Fitri.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persentase efektivitas penerimaan retribusi parkir Kota Bandung dari tahun 2009 hingga tahun 2018 mengalami fluktuasi dengan empat tahun terakhir tidak efektif. Adapun perhitungan dengan garis *trend* didapat persamaan  $Y' = 58,15633 - 5,74120 (X)$  kemudian dilakukan pengujian apakah signifikan atau tidak yaitu dengan menggunakan uji t. Setelah dilakukan pengujian diketahui bahwa t hitung  $-6,47216 < -2,26216$  t tabel sehingga  $H_0$  ditolak berarti terdapat perkembangan efektivitas retribusi parkir yang signifikan di Kota Bandung pada tahun 2009 hingga tahun 2018. Adapun perkembangan tersebut memiliki *trend* yang menurun.
2. Evaluasi efektivitas pemungutan retribusi parkir di Kota Bandung dengan teori efektivitas 7-S dari McKinsey menunjukkan bahwa dimensi strategi, struktur, sistem, *skill*, maupun staf dinilai belum terpenuhi sehingga efektivitas pemungutan retribusi parkir belum efektif. Hal ini disebabkan tidak adanya visi dan misi yang spesifik, penetapan target penerimaan retribusi parkir yang *over-*

*estimate*, kurangnya sumber daya manusia, tidak adanya deskripsi pekerjaan yang jelas, anggaran yang terhambat sistem sentralisasi, kurangnya pemenuhan komitmen dalam berkomunikasi, tidak optimalnya implementasi sistem pemungutan dan penyetoran dengan ketentuan, dan masih lemahnya pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alshaher, A. A. F. (2013). The McKinsey 7S model framework for e-learning system readiness assessment. *International Journal of Advances in Engineering & Technology*, 6(5), 1984–1966. Retrieved from [https://portal.arid.my/Publications/2I17-IJAET1117362\\_v6\\_iss5\\_1948-1966180713043.pdf](https://portal.arid.my/Publications/2I17-IJAET1117362_v6_iss5_1948-1966180713043.pdf)
- Anom. (2008). *The McKinsey 7S framework: ensuring the all part of your organization work in harmony*. 12–80. Retrieved from [https://www.mindtools.com/pages/article/newSTR\\_91.htm](https://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_91.htm)
- Apriadi, B. F. (2019). Dampak Tingginya Kepadatan Penduduk di Kota Bandung. *Kompasiana.Com*. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/bagusfadhilahapriadi0897/5cde7b86733c43571320f527/dampak-tingginya-kepadatan-penduduk-di-kota-bandung?page=all#sectionall>
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung. (2019). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung*. Bandung.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (2019). *Kota Bandung dalam Angka*. Retrieved from <https://bandungkota.bps.go.id>
- Bungin, B. (2009). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fadillah, A. (2013). *Administrasi pendapatan retribusi parkir di Kota Bogor (Tesis)* (Universitas Indonesia, Depok). Retrieved from <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S46720-AhmadFadillah>



- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan.* , Pub. L. No. 690.900.327 (1996).
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016.* , Pub. L. No. 52 (2015).
- Mulyatiningsih, E. (2011). *Riset Terapan: bidang pendidikan dan teknik.* Retrieved from <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132296045/lainlain/buku-riset-terapan-apri.pdf>
- Murmaningtyas, V. W. K. (2007). *Analisis efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi pasar serta kontribusinya terhadap pendapatan daerah (Skripsi)* (Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta). Retrieved from [http://repository.usd.ac.id/15069/3/032114003\\_Full.pdf](http://repository.usd.ac.id/15069/3/032114003_Full.pdf)
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Neuman, W. L. (2003). *Social Research Methods: qualitative and quantitative approaches.* Boston: Allyn and Bacon.
- Nuansa, F. (2012). *Efektivitas pemungutan pajak penggunaan energi listrik atas listrik yang dihasilkan oleh badan usaha milik swasta PT. X (studi atas DPPKA Kabupaten Bekasi) (Skripsi)* (Universitas Indonesia, Depok). Retrieved from <http://lib.ui.ac.id>
- Nugroho, A. (2011). *Strategi pemerintah Kota Surakarta dalam penataan perparkiran (studi deskriptif kualitatif tentang pelaksanaan strategi penataan perparkiran oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Kota Surakarta) (Skripsi)* (Universitas Sebeleas Maret, Surakarta). Retrieved from <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMOJW2tIzpAhXcIbcAHYrNAtsQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fdigilib.uns.ac.id%2Fdokumen%2Fdownload%2F23081%2FNDgOMDU%3D%2FStrategi-Pemerintah-Kota-Surakarta-dalam-Pen>
- Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum.* , Pub. L. No. 23 (2005).
- Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum.* , Pub. L. No. 74 (2012).
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.* , Pub. L. No. 28 (2009).
- Religia, D. & Pratomo, D. (2014). Analisis pengaruh efektivitas pajak dan retribusi parkir terhadap efektivitas pendapatan asli daerah Kota Bandung tahun 2011 sampai 2013. *E-Proceeding of Management*, 1(3), 158–169. Retrieved from <https://libraryproceeding.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/3674/3483>
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2008). *Perilaku Organisasi: Organizational Behavior* (12th ed.).
- Sabana, C. & Sutrisno, C. R. (2013). Potensi retribusi parkir di Kabupaten Pekalongan. *Pena Jurnal Ilmu Pengentahuan Dan Teknologi*, 24(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31941/jurnalpena.v24i1.75>
- Saleh, S. (2004). *Statistika Deskriptif* (1st ed.). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Sopbaba, S. J. E., Rusmiwari, S., & Hardianto, W. T. (2012). Implementasi kebijakan retribusi parkir terhadap PAD. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(2), 16–25. Retrieved from <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/35/96>
- Sudjana. (2005). *Metoda Statistika.* Bandung: PT Tarsito.
- Suherlan. (2015). Identifikasi jenis pajak dan retribusi daerah beserta potensinya di Kabupaten Subang. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 13–33. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31506/jap.v6i1.2432>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Teguh, A. C. (2010). *Analisis kontribusi retribusi parkir dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah: studi kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta*

(*Skripsi*) (Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta). Retrieved from [http://repository.usd.ac.id/16221/2/052114079\\_Full.pdf](http://repository.usd.ac.id/16221/2/052114079_Full.pdf)

Triani, A. (2019, November 5). Kemacetan Bandung dan “Big Data.” *Detik.Com*. Retrieved from <https://news.detik.com/kolom/d-4772429/kemacetan-bandung-dan-big-data>

UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung. (2019). *Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung*. Bandung.

Wali Kota Bandung. *Keputusan Walikota Bandung nomor 551/Kep.648-DisHub/2017 tentang penetapan lokasi dan posisi parkir di tepi jalan Umum dan tempat khusus parkir di Kota Bandung.* , Pub. L. No. 551 (2017).

Wali Kota Bandung. *Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 4 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 16 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perhubungan dan retribusi di bidang perhubungan.* , Pub. L. No. 4 (2017).

Yani, A. (2002). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian: kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan* (1st ed.). Jakarta: Prenadamedia Group.